

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama dari keberhasilan pembangunan daerah, karena menunjukkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Umumnya, pertumbuhan diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB dengan harga yang berlaku menggambarkan kinerja perekonomian daerah, sementara PDRB dengan harga tetap berfungsi untuk membandingkan pertumbuhan nyata dari tahun ke tahun. (Laodini et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi global mengalami perlambatan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang diperburuk oleh konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian kebijakan. World Bank (2024) memproyeksikan pertumbuhan global hanya sekitar 2,3% pada 2025, salah satu yang terendah di luar masa krisis besar. Dampaknya juga dirasakan Indonesia, yang sempat berkontraksi -5,32% pada kuartal II 2020 (BPS, 2020) sebelum pulih menjadi 5,31% di 2022 (BPS, 2022).

Dampak pandemi COVID-19 juga terlihat pada tingkat regional, termasuk di Pulau Sumatra, yang merupakan kontributor terbesar kedua untuk produk domestik bruto (PDB) nasional setelah Jawa dan memberikan kontribusi sekitar 22% terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan (BPS, 2023). Namun, pertumbuhan antar daerah di Sumatera menunjukkan pola yang tidak seimbang, yang mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi dan kemampuan fiskal setiap daerah.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera stabil pada 4–5% per tahun sebelum pandemi (2016–2019), termasuk Sumatera Barat yang tumbuh rata-rata 5,18%. Pandemi 2020 memicu kontraksi, terutama di daerah yang bergantung pada industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, seperti Kepulauan Riau (-3,80%), Bangka Belitung (-2,29%), Lampung (-1,66%), dan Sumatera Barat (-1,61%) (World Bank, 2020). Pemulihan mulai terlihat sejak 2021,

meski berbeda antarprovinsi. Penurunan konsumsi, investasi, dan daya beli selama pandemi menekan kapasitas fiskal daerah (Khairul Akbar et al., 2022), sehingga efektivitas belanja publik, khususnya belanja modal dan sosial, menjadi kunci. Kebijakan fiskal adaptif seperti realokasi anggaran, bantuan sosial, dan percepatan vaksinasi turut mempercepat pemulihan (Chumaida et al., 2022). Untuk melihat variasinya, berikut ditampilkan data pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2016–2023.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (persen)

No	Provinsi	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23
2	Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3	Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
4	Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21
5	Jambi	4,37	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,70	5,12	4,67
6	Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,24	5,08
7	Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28
8	Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,38
10	Kepulauan Riau	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,80	3,43	5,06	5,16

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2023

Sebelum pandemi, Sumatera Barat tumbuh rata-rata 5,18% per tahun (2016–2019), menempati posisi ketiga tertinggi di Sumatera. Capaian ini mencerminkan fondasi ekonomi daerah yang cukup kuat. Namun, pada 2020 pandemi COVID-19 memicu kontraksi tajam sebesar -1,61%, mengungkap kerentanan struktur ekonomi provinsi ini terhadap guncangan eksternal. Meski pertumbuhan mulai pulih pada 2021–2023, rata-rata hanya mencapai 2,67% dan membuat posisi Sumatera Barat turun ke peringkat kedelapan di Sumatera. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang terbatas, ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan krisis, dan pengelolaan PAD, dana transfer, serta belanja daerah yang belum optimal. Situasi ini menjadikan Sumatera Barat menjadi daerah yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam melihat sejauh mana

instrumen fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023 (Rp)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Transfer
2016	1.964.148.975.799	2.576.754.985.110
2017	2.134.010.519.503	3.868.405.969.982
2018	2.275.090.068.587	3.930.814.210.887
2019	2.328.432.873.686	4.027.349.115.496
2020	2.255.072.985.427	4.002.468.880.936
2021	2.551.899.163.309	4.077.691.924.339
2022	2.851.966.014.893	3.192.216.355.418
2023	2.784.774.801.213	3.464.761.720.139

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2025

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, PAD di Sumatera Barat naik dari Rp1,96 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2,78 triliun pada tahun 2023.. Lonjakan terbesar terjadi pada 2022, yakni sekitar 11,8% dibandingkan 2021, seiring membaiknya aktivitas ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat naik dari Rp2,57 triliun pada 2016 hingga mencapai puncaknya Rp4,08 triliun pada 2021, Kemudian mengalami penurunan yang besar menjadi Rp3,19 triliun di tahun 2022 dan naik sedikit menjadi Rp3,46 triliun di tahun 2023. Selama periode ini, kontribusi PAD masih jauh di bawah dana transfer, mencerminkan adanya gap fiskal yang cukup lebar.

Ketidakseimbangan fiskal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih sangat bergantung pada uang dari pemerintah pusat untuk mendukung pengeluaran publiknya. Menurut Oates (1999), ketergantungan yang besar pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat menghambat ruang fiskal daerah dan melemahkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lokal secara mandiri. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, ketergantungan ini bisa menghambat pembangunan jika pengeluaran tidak diarahkan pada sektor-sektor yang produktif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sinurat et al. (2023) yang menyatakan efek *flypaper* di sejumlah daerah, termasuk Sumatera Barat, di mana dana transfer sangat mempengaruhi pengelolaan PAD. Oleh sebab itu, upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal dengan meningkatkan distribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola pengeluaran pemerintah dengan baik dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, pemahaman tentang dinamika keuangan daerah tidak bisa terpisahkan dari kerangka kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, kebijakan ini sangat penting untuk memperkuat otonomi daerah agar pengelolaan sumber daya fiskal dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Oates (1999), penyerahan wewenang fiskal kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan karakteristik wilayah yang mereka kelola.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membantu perkembangan ekonomi di daerah sejak otonomi daerah mulai diterapkan pada tahun 2001 dan diperkuat dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kebijakan ini memberi kewenangan luas bagi daerah untuk mengelola keuangan, dengan menekankan optimalisasi PAD, DBH, DAU, dan DAK serta pengalokasian belanja daerah pada sektor-sektor produktif guna mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan layanan publik. Namun, efektivitas desentralisasi sangat dipengaruhi kapasitas daerah dalam menggali PAD dan mengelola transfer secara efisien. Banyak daerah masih bergantung pada dana pusat sehingga memunculkan fenomena *flypaper effect*, di mana belanja lebih ditentukan oleh transfer daripada kemandirian fiskal. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal lokal dan peningkatan kualitas belanja menjadi kunci agar desentralisasi benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Oates, 1999; Bird & Vaillancourt, 2000; Silvia & Sunarya, 2019).

Selain sektor fiskal, kualitas manusia memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Salah satu parameter yang dipakai untuk mengevaluasi kualitas ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup faktor-faktor seperti kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (lama dan rata-rata pendidikan yang diharapkan), serta standar hidup yang layak (pendapatan per kapita) (BPS, 2023). Menurut teori pertumbuhan neoklasik Solow-Swan, peningkatan mutu sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mempercepat penerimaan teknologi baru, yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Dalam konteks Sumatera Barat, perkembangan IPM selama 2018–2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata Pertumbuhan
2016	70,73	1,07
2017	71,24	0,72
2018	71,73	0,69
2019	72,39	0,92
2020	72,38	-0,01
2021	72,65	0,37
2022	73,26	0,84
2023	73,75	0,67

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025

Selain kemampuan fiskal, kualitas manusia juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan ekonomi. Melihat data dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat naik dari 70,73 pada tahun 2016 menjadi 73,75 di tahun 2023, walaupun sempat tidak berubah pada tahun 2020 karena pandemi. Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup.

Secara mekanisme, PAD berperan sebagai instrumen kemandirian fiskal yang memungkinkan daerah mengalokasikan belanja produktif pada sektor-sektor pembangunan. Peningkatan PAD memperbesar kapasitas daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang selanjutnya mendorong

pertumbuhan ekonomi (Oates, 1999). Dana transfer dari pemerintah pusat berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal yang memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah. Jika dimanfaatkan secara produktif, dana transfer dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan (Musgrave & Musgrave, 1989). Namun, ketergantungan yang tinggi berpotensi menurunkan insentif daerah untuk menggali PAD, menimbulkan fenomena *flypaper effect* (Sinurat et al., 2023). Sementara itu, IPM menggambarkan mutu sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang memadai. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mempercepat penyebaran teknologi, sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik dari Solow-Swan (Todaro & Smith, 2015). Secara empiris, Winarti et al. (2022) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan, meskipun dalam keadaan krisis, efek tersebut sering kali terhambat (Maulana et al., 2022).

Berbagai studi sebelumnya mengindikasikan bahwa dampak instrumen fiskal dan kualitas manusia terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi. Silvia & Sunarya (2019) menemukan PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan, sementara DAK tidak. Laodini et al. (2023) justru menemukan PAD berpengaruh negatif di Sulawesi Utara. Oktavia & Zulvia (2023) menunjukkan Dana Perimbangan signifikan di Sumatera Barat, namun PAD tidak. Dalam konteks IPM, Winarti et al. (2022) membuktikan pengaruh positif, sementara Maulana et al. (2022) menemukan tidak signifikan pada masa pandemi.

Dari berbagai temuan tersebut terlihat bahwa pengaruh instrumen fiskal dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia kurang konsisten. Sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sementara lainnya menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan, khususnya pada masa krisis seperti pandemi COVID-19. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak fiskal dan kualitas modal manusia dipengaruhi oleh konteks wilayah, kapasitas pengelolaan fiskal, kualitas belanja publik, serta kondisi eksternal. Sejauh ini masih terbatas penelitian yang secara simultan mengkaji PAD, Dana Transfer, IPM, dan pandemi COVID-19 dalam satu kerangka analisis di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan menyajikan pemahaman yang lebih

mendalam dan menyeluruh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Mengingat kondisi ini, penelitian ini memiliki peranan penting untuk mengetahui bagaimana potensi fiskal daerah dan mutu sumber daya manusia, yang dinilai dengan IPM, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pandemi COVID-19 yang menjadi guncangan terbesar dalam beberapa tahun belakangan, juga harus dilihat sebagai faktor luar yang berpotensi mempengaruhi pola pertumbuhan. Diharapkan hasil dari studi ini tidak hanya berguna untuk studi di dunia akademis, tetapi juga bisa jadi rujukan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik serta bisa menanggapi perubahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Dana Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh Dana Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

4. Mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dari dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis:

1. **Manfaat Teoritis**

Studi ini bertujuan untuk memperluas kajian di sektor ekonomi publik dan pembangunan regional, khususnya mengenai keterkaitan antara komponen fiskal dan kualitas manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengkaji secara bersamaan pengaruh Pendapatan Pajak Daerah (PAD), transfer dana dari pusat, IPM, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, studi ini bisa membantu dalam pengembangan ide-ide tentang desentralisasi dalam penggunaan anggaran dan teori ekonomi neoklasik. Di samping itu, penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana kemampuan anggaran dan kualitas sumber daya manusia dapat memperkuat ketahanan ekonomi suatu daerah, terutama di tempat-tempat dengan kondisi anggaran yang berbeda-beda seperti Provinsi Sumatera Barat.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, temuan dari studi ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memahami pengaruh PAD, Dana Transfer, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan fiskal dan mengarahkan belanja publik ke sektor produktif yang berdampak jangka panjang. Selain itu, temuan ini dapat mendorong kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini berfokus pada kajian mengenai pengaruh pendapatan daerah yang didapat dari potensi lokalnya, alokasi anggaran dari pemerintah pusat, dan

kualitas manusia yang dilihat dari IPM terhadap kinerja perekonomian suatu wilayah. Studi ini terbatas pada data yang diambil dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2016-2023, yang juga mencerminkan dinamika perekonomian sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga penelitian ini tidak meneliti lebih dalam aspek sosial politik dari kebijakan fiskal atau faktor kualitatif lainnya. Tujuan analisis adalah untuk mengetahui sejauh mana kapasitas fiskal dan mutu sumber daya manusia dapat menjelaskan variasi dalam kinerja ekonomi antar daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal di Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, pembahasan dibagi menjadi lima bab utama, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan, pertanyaan utama yang hendak dijawab (rumusan masalah), serta menjelaskan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, akan ditemukan teori-teori yang mendasari penelitian ini, ulasan penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan pengumpulan dan analisis data. Ini mencakup jenis data, sumbernya, metode analisis yang digunakan, dan definisi dari setiap variabel yang diteliti.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dipresentasikan dalam bagian ini. Selanjutnya, kita akan membahas hasil ini dengan menghubungkan dengan teori, data yang dikumpulkan, dan hasil penelitian yang terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Bagian akhir ini mencakup kesimpulan penelitian dan rekomendasi untuk pihak akademik dan praktis yang berkepentingan.

